Received: 21 Feb 2026 ; Revised: 19 Jul 2026 ; Published: 1 Nov 2026

ETIKA DEMOKRASI PANCASILA DALAM POLA ALGORITMA MEDIA SOSIAL: FILTER BUBBLE, ECHO CHAMBER, DAN POLARISASI POLITIK DI INDONESIA

Muhammad Zidan Ansyarudin Al Muiz
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
zidanalmuiz94@gmail.com

ABSTRACT

The development of digital technology and social media has had a significant impact on democratic life in Indonesia. The operation of social media algorithms can create filter bubbles and echo chambers, which can limit the diversity of information and divide society. This raises ethical issues regarding the practice of Pancasila democracy. This article examines how Pancasila democratic values can become ethical in overcoming the anarchic influence of social media on the public sphere. The method used in this research is a literature review with a normative approach. The analysis shows that the integration of Pancasila values can serve as a foundation for improving digital literacy, enforcing fair social media regulations, and fostering positive democracy in the digital space. Thus, Pancasila democracy remains relevant and adaptive to the challenges of the current algorithmic era.

Keywords: Pancasila, Democracy, Ethics, Algorithm, Social Media.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi pengaruh besar pada kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Beroperasinya algoritma media sosial dapat menciptakan *filter bubbles* (gelembung filter) dan *echo chambers* (ruang gema), yang dapat membatasi keragaman informasi dan memecah belah masyarakat. Hal ini menimbulkan persoalan etika terhadap praktik berdemokrasi Pancasila. Artikel ini mencoba mengkaji bagaimana nilai-nilai demokrasi Pancasila bisa menjadi etika dalam mengatasi pengaruh media sosial yang bersifat anarkis pada ruang publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk meningkatkan literasi digital, penegakan regulasi media sosial yang adil, dan pembinaan demokrasi yang positif di ruang digital. Dengan demikian, demokrasi Pancasila tetap relevan dan adaptif menghadapi tantangan era algoritma saat ini.

Kata kunci: *Pancasila, Demokrasi, Etika, Algoritma, Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah membawa perubahan begitu besar terhadap dinamika komunikasi publik dan praktik demokrasi di Indonesia. Data *digital 2026: Indonesia* mencatat bahwa jumlah pengguna internet mencapai 230 juta orang (80,5% dari populasi), sedangkan identitas pengguna media sosial mencapai 180 juta atau 62,9% dari populasi, meningkat 26% dibandingkan tahun sebelumnya (We Are Social & Meltwater, 2025). Media sosial tidak lagi sekedar sarana berbagi informasi saja, melainkan juga menjadi sebagai ruang diskusi, arena politik, bahkan juga bisa membuat pembentukan opini publik. Namun, di balik kemudahan akses informasi tersebut, terdapat mekanisme algoritma yang bekerja secara masif dalam mengatur aliran konten yang diterima oleh pengguna. Algoritma ini menciptakan fenomena *filter bubbles (*gelembung filter) dan *echo chambers* (ruang gema), yaitu kondisi di mana individu hanya terekspos pada informasi yang sesuai dengan perefrensinya yang muncul itu saja, sehingga meminimalisasikan keberagaman pandangan yang lain.

Fenomena tersebut menimbulkan dilema etis bagi demokrasi di indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi yang diidealkan Pancasila yakni menekankan musyawara, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, serta keberagaman sebagai bagian dari persatuan bangsa (Kaelan, 2013). Namun, algoritma media sosial justru cenderung mendorong fragmentasi sosial, polarisasi politik, dan penyebaran disinformasi yang dapat melemahkan kualitas demokrasi. Dalam konteks ini muncul pertanyaan penting: bagaimana nilai-nilai demokrasi Pancasila dapat diinternalisasikan sebagai pedoman etis untuk menghadapi tantangan algoritma media sosial? Pertanyaan ini relevan, mengingat Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi terbuka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu" kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", secara filosofis menuntut adanya ruang public yang sehat, inklusif, dan berlandaskan pada etika komunikasi. Lebih jauh, penelitian ini penting untuk menegaskan bahwa demokrasi Pancasila memiliki relevansi dalam konteks digital (Latif, 2011). Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan etis dalam merancang kebijakan publik terkait regulasi media sosial, mengembangkan literasi digital masyarakat, serta mendorong tanggung jawab etis penyedia platform digital. Dengan demikian, artikel ini berupaya menghubungkan kajian antara teknologi, etika, dan kebangsaan, sekaligus menawarkan Solusi berbasis Pancasila dalam menghadapi tantangan algoritma media sosial.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas hubungan antara algoritma media sosial dan kehidupan demokrasi. Wulandari dkk (2021) menunjukkan pengaruh algoritma *filter bubble* dan *echo chamber* terhadap perilaku penggunaan internet, Santoso (2023) menyoroti pembentukan opini publik politik di Indonesia, dan Al-Fatih dkk (2024) mengkaji peran algoritma dalam penyebaran propaganda politik digital menjelang pemilu. Di sisi lain, kajian tentang pancasila di era digital umumnya berfokus pada etika bermedia sosial, pendidikan karakter, dan analisis wacana ideologi (Nashoha dkk., 2025: Rafif dkk., Supriyatno dkk., 2024). dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian kajian tentang dampak algoritma cenderung berhenti pada pemetaan masalah, sedangkan kajian tentang pancasila belum secara khusus menjadikan etika demokrasi pancasila sebagai kerangka normatif untuk menilai dan mengarahkan pola kerja algoritma media sosial, yaitu personalisasi konten orientasi *engagement,* dan model ekonomi atensi.

Kebaruan dari artikel ini terletak pada upaya mengoprasionalkan etika demokrasi pancasila, khususnya sila kedua, ketiga, dan keempat, sebagai kerangka normatif yang menghubungkan pola kerja algoritma media sosial dengan tida domain penerapan, yaitu etika desain teknologi tata kelola platfrom, dan pendidikan serta pembudayaan etika digital. Berbeda dari kajian sebelumnya yang berhenti pada identifikasi dampak, artikel ini menawarkan solusi berbasis pancasila yang bersifat konseptual sekaligus praktis. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah menganalisis relevansi etika demokrasi Pancasila dalam menghadapi pola algoritma media sosial yang memicu *filter bubble, echo chamber,* dan polarisasi politik di Indonesia, sekaligus menguubungkan antara teknologi, etika dan kebangsaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Pustaka (library research). pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi nilai-nilai etika demokrasi Pancasila terkait dampak algoritma media sosial dalam kehidupan demokrasi di indonesia. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada sifat penelitian yang bersifat analitis dan konseptual, bukan empiris. Data diperoleh lewat kajian berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal, laporan riset, dan juga dokumen resmi yang relevan. Beberapa refrensi di antaranya Adalah tulisan Yudi Latif mengenai aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbagsa (Latif, 2011). Donny B.U. yang membahas tentang etika digital dan demokrasi (Donny B.U, 2022), serta studi dari jurnal ilmu komunikasi UGM dan jurnal Pancasila dan kewarganegaraan.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap : redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang mengacu pada model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 2014). Data kemudian

dianalisis secara detail untuk mengindetifikasi relevansi nilai-nilai demokrasi Pancasila khususnya sila keempat dalam pengembangan etika komunikasi serta tanggung jawab moral di dunia digital. Dengan metode ini, diharpkan bisa memberikan wawasan konseptual tentsng pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis dalam menghadapi tantangan dari algoritma media sosial yang memengaruhi Tindakan demokrasi masyarakat di indonesia.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang hubungan antara demokrasi Pancasila, etika, dan media sosial semakin relevan di era digital. Berbagai studi dan literatur menunjukkan bahwa perkembangan algoritma media sosial telah memberikan dampak signifikan terhadap demokrasi indonesia. Menurut Yudi Latif, Pancasila bukan sekadar cita-cita nasional; ia juga merupakan kode moral dan sosial yang memengaruhi praktik-praktik demokrasi agar selaras dengan prinsip-prinsip martabat dan kesetaraan manusia (Latif, 2011). Oleh karena itu, demokrasi Pancasila mendorong keselarasan antara ikatan individu dan sosial melalui dukungan timbal balik dan upaya kooperatif. Dalam konteks era digital, prinsip-prinsip ini krusial untuk mengatur urusan negara di tengah minimnya opini publik dan informasi.

Sebaliknya, Donny B.U. dalam bukunya "Etika Digital dan Masa Depan Demokrasi Indonesia" menegaskan bahwa algoritma media sosial memiliki kemampuan untuk mengubah nilai-nilai demokrasi menjadi "demokrasi semu" karena perilaku pengguna ditentukan oleh logika algoritmik yang lebih berfokus pada keterlibatan daripada kebenaran dan nilai etika (Donny B.U, 2022). Ia menekankan pentingnya literasi digital yang berlandaskan moral agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga individu yang aktif dan terlibat secara sosial.

Menurut penelitian Wahyudi Joko Santoso dalam Jurnal Ilmu Komunikasi UGM, algoritma media sosial memperburuk fenomena filter bubble dan echo chamber yang menghambat komunikasi dan mempolarisasi politik (Santoso, 2023). Kondisi ini sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan bangsa. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai etika Pancasila menjadi penting untuk menanggapi tantangan tersebut.

Menurut kajian Frans Magnis-Suseno tentang film moral, Pancasila mengandung dimensi sosial yang universal sekaligus kontekstual. Prinsip-prinsip moral seperti kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab menjadi landasan bagi upaya bangsa untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi (Suseno, 2018). Dengan demikian, penerapan demokrasi Pancasila di era algoritma dapat dipandang sebagai upaya untuk menangkal fokus yang tidak manusiawi terhadap kodrat manusia di tengah perkembangan digital.

Dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang demokrasi Pancasila dalam konteks algoritma media sosial memiliki imperatif

akademis dan sosial. Mayoritas penelitian berfokus pada dampak algoritma terhadap tindakan politik, tetapi belum banyak yang membahas bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menangani isu-isu algoritma secara filosofis dan praktis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi etika demokrasi Pancasila dalam membangun lingkungan digital yang stabil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Algoritma media sosial dan tantangan demokrasi

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah menjadikan media sosial sebagai salah satu ruang publik utama yang menjadikan kehidupan masyarakat modern. Data terbaru menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan sekitar 21jam 50 menit per minggu di media sosial, termasuk untuk menonton video daring, dengan rata-rata menggunakan 7,7 platform setiap bulan (We Are Social & Meltwater, 2025). Dari sisi jangkauan, Tiktok tercatat memiliki jangkauan iklan tertinggi di Indonesia, yakni sekitar 180 juta orang, sementara Facebook dan Instagram masing-masing menjangkau sekitar 121 juta dan 108 juta orang pada akhir 2025 (We Are Social & Meltwater), 2025). Platform seperti Facbook, Instagram, Tiktok, dan X (Twitter) ini tidak lagi menjadi sarana komunikasi antarpersonal saja, melainkan juga menjadi arena pembentukan opini publik dan bahkan pengaruh politik. Dibalik tampilan yang interaktif dan demokratis, media sosial bekerja berdasarkan sistem algoritma yang kompleks dan tersembunyi. Algoritma ini menentukan konten apa yang akan di lihat pengguna berdasarkan perefrensi, iteraksi, dan Riwayat aktivitas digital mereka.

1. Pola kerja Algoritma: Personalisasi konten, Engagement, dan Iklan

Secara teknis, algoritma media sosial berfungsi sebagai mekanisme selekesi otomatis yang mengatur aliran informasi berdasarkan data perilaku pengguna (*user behavior)*. Algoritma ini menganalisis setiap Tindakan pengguna mulai dari like, berbagi, komen, hingga waktu menatap layer pada suatu konten untuk menilai minat mereka. Berdasarkan analisis tersebut, sistem akan merekomendasikan konten serupa dengan harapan meningkatkan keterlibatan *(engagement)* pengguna. Dengan demikian, semakin sering seseorang berinteraksi dengan jenis konten tertentu, semakin besar kemungkinana algoritma akan menampilkan konten yang sejenis di masa mendatang (Rahardjo, 2021).

Proses ini disebut dengan *personalisasi konten,* yaitu upaya untuk menyesuaikan pengalaman digital setiap pengguna agar lebih relevan dan menarik. Dalam konteks bisnis, personalisasi ini juga berkaitan erat dengan sistem periklanan digital yang menjadi sumber utama pendapatan platfrom.

Platfrom media sosial bekerja dengan model ekonomi atensi, di mana perhatian pengguna bertahan di platform, semakin besar peluang bagi Perusahaan untuk menayangkan iklan yang sesuai dengan profil psikografis pengguna tersebut (Dewi, 2022).

Namun, logika ekonomi yang mendasari algoritma media sosial sring kali beerimplikasi negative terhadap kualitas komunikasi publik. Tujuan utama algoritma bukanlah untuk memperluas wawasan atau membangun pemikiran kritis, melainkan untuk mempertahankan keterlibatan pengguna. Karena itu, sistem algoritma cenderung menampilkan konten yang bersifat emosional, sensasional, atau konterversial jenis konten yang secara psikologis paling efektif menarik perhatian manusia. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong munculnya fenomena *filter bubble* dan *echo chamber,* di mana individu hanya terekspos pada pandangan yang mempekuat keyakinannya sendiri (Wulandari,dkk, 2021).

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Tingkat global, tetapi juga sangat nyata dalam konteks Indonesia. Sebuah penelitian yang di lakukan oleh Wahyudi joko santoso menunjukan bahwa algoritma media sosial di indonesia memperkuat bias politik dan menurunkan kualitas diskursus publik, terutama selama masa pemilihan umum (Santoso.W.J,2023). Dengan kata lain, sistem aloritma yang seolah netral justru berpotensi membentuk opini publik yang sempit dan terpolarisasi.

2. Dampak Algoritma: Polarisasi Politik, Disnformasi, dan krisismkepercayaan publik

Dampak algoritma terhadap kehidupan sosial politik masyarakat indonesia semakin kompleks. Salah satu konsekuensi yang paling signifikan adalah meningkatnya polarisasi politik. Polarisasi ini bisa muncul ketika masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang saling menolak satu sama lain karena perbedaan pandangan politik. Media sosial mempercepat peroses ini dengan cara menciptakan ruang gema *(echo Chamber)*, Dimana pengguna hanya berinteraksi dengan kelompok-kelompok sepemikiran. Ketika kondisi ini terjadi, ruang dialog publik yang ideal sebagaimana diharapkan dalam nilai-nilai Pancasila akan berubah menjadi wadah yang hanya menegaskan pendapat dan keyakinan masing-masing pihak (Al Fatih.I.Z, & Putera, R. A.,& Umar.Z.H, 2024).

Dalam konteks demokrasi Indonesia, fenomena polarisasi politik digital khususnya terlihat jelas pada tahun 2014 dan 2019. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (PusKaKom UI), interaksi politik di media sosial selama kurun waktu tersebut menunjukkan adanya tingkat segregasi yang tinggi, di mana kelompok pro dan kontra terhadap kandidat politik yang bersangkutan menciptakan ekosistem informasi yang terpisah. Sehingga menggakibatkan, terjadinya penurunan

kualitas dialog publik dan menungkatnya permusuhan berbasis identitas politik.

Selain polarisasi, algoritma media sosial juga berperan signifikan dalam pelaporan disinformasi atau hoaks. Karena sistem algoritma secara konsisten memprioritaskan konten dengan potensi viral yang tinggi, konten yang provokatif atau sensual seringkali lebih banyak mendapat perhatian daripada konten yang akurat. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dari tahun 2018 hingga 2023, terdapat lebih dari 11.000 artikel yang dipublikasikan di media sosial, sebagian besar bertopik politik, agama, dan kesehatan (Mileneo.M.F, 2024). Dengan adanya disinformasi ini bisa memperlemah kepercayaan public terhadap instituisi negara dan media arus utama.

Menurut Tutik Wijayanti dkk (2024), dalam bukunya *Demokrasi Era Digital*, algoritma media sosial menciptakan semacam "demokrasi semu" yaitu, suatu kondisi ketika masyarakat umum memiliki rasa ekspresi yang kuat, yang sebagian besar ditentukan oleh pencarian algoritmik yang mengidentifikasi informasi yang dilihat orang. Temuan mereka menunjukkan bahwa dalam demokrasi semacam itu, nilai kebebasan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip moral, sehingga yang muncul bukanlah debat yang penuh kekerasan, melainkan opini yang kuat dan emosional (Wijayanti, Dkk, 2024).

Oleh karena itu, tantangan terbesar yang dihadapi demokrasi Indonesia di era digital tidak hanya terletak pada bidang politik formal namun juga pada etika sosial yang menjadi landasan demokrasi itu sendiri. Demokrasi Pancasila sejatinya menempatkan manusia sebagai subjek yang bermoral, yang memiliki kebebasan sekaligus tanggung jawab untuk mencari kebenaran melalui dialog dan musyawarah. Namun algoritma media sosial hanya menggunakan orang sebagai objek ekonomi, menggunakannya sebagai sumber data dan persepsi manusia (datafied human).

Fenomena ini menyoroti gagasan dari Yudi Latif bahwa Pancasila tidak hanya dapat dipahami sebagai kerangka normatif, tetapi juga perlu dihayati dalam situasi dunia nyata, seperti dunia digital. Oleh karena itu, prinsip "hikmat kebijaksanaan" yang fundamental menekankan pentingnya refleksi moral dan logis dalam setiap komunikasi politik dan sosial (Latif, 2011). Oleh karena itu, penerapan etika digital berbasis Pancasila sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi di era algoritma tetap berakar kuat pada kodrat manusia dan kemajuan sosial.

B. Etika demokrasi Pancasila

Pancasila merupakan landasan moral dan filosofis bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Konsep ini tidak hanya berfokus pada sistem politik formal; tetapi juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral dalam

kehidupan sosial, seperti kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Dalam Pancasila, demokrasi tidak dipandang sebagai tanda kecenderungan politik atau otoriter, melainkan sebagai praktik yang berakar pada keyakinan moral dan spiritual bangsa Indonesia (Wijayanti, Dkk, 2024).

Menurut Yudi Latif, demokrasi Pancasila dibangun di atas prinsip "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," yang berarti bahwa opini publik harus dicapai melalui dialog yang rasional dan kooperatif, alih-alih melalui dominasi kekuasaan atau polarisasi sosial (Latif, 2011). Poin utama yang disampaikan oleh Pancasila adalah keseimbangan antara tanggung jawab individu dan kolektif, serta antara kewajiban bangsa dan warga negaranya. Dalam konteks ini, demokrasi berfungsi sebagai keyakinan untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak menghambat kemajuan persatuan bangsa dan nilai-nilai kemanusiaan.

1. **Hakikat Etika Demokrasi Dalam Persepektif Pancaasila**

Dalam Pancasila, etika demokrasi didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang bersumber dari beberapa sila. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menyatakan bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan meminimalkan penderitaan manusia dan meminimalkan kebencian ujaran. Sebaliknya, sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menjelaskan bahwa ruang publik, termasuk media sosial, berfungsi sebagai sarana untuk membina kohesi sosial tanpa menciptakan fragmentasi digital atau permusuhan. Sila keempat memiliki makna paling langsung dalam konteks demokrasi, yakni kebijakan secara kolektif dan permusyawaratan. Dalam praktik ini, demokrasi Pancasila mendorong seluruh warga negara untuk bersikap merenungkan Kembali, berperilaku rasional, dan menyadari pentingnya bekerja sama di atas kepentingan pribadi (Priwardani A.N, Dkk, 2023).

Di era algoritma media sosial, prinsip-prinsip ini menjadi semakin penting karena komunikasi digital seringkali merusak moralitas dan kebijaksanaan. Demokrasi berbasis algoritma secara konsisten mendorong spotanitas dan perilaku tekan klik bukan dengan refleksi. Adapun akibatnya, persepsi publik terhadap proses musyawara pun terpengaruh. Oleh karena itu, etika demokrasi Pancasila merupakan komponen kunci dalam mendorong partisipasi nasional di ruang digital ini.

2. **Etika Demokrasi sebagai panduan moral di era Algoritma**

Pergeseran demokrasi ke ruang digital telah membawa tantangan besar bagi nilai-nilai etika Pancasila. Media sosial yang dikendalikan algoritma tidak beroperasi atas dasar nilai-nilai moral, melainkan atas dasar logika komersial dan teknologis. Algoritma tidak dirancang untuk meningkatkan keterlibatan, melainkan untuk memaksimalkan kualitas dialog publik. Dalam konteks ini,

demokrasi berisiko direduksi menjadi kompetisi opini dangkal, yang didorong oleh popularitas, bukan oleh substansi.

Penelitian terbaru oleh Nashoha A.M.M, Dkk dalam jurnal Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara menyatakan bahwa lemahnya kesadaran etika digital di kalangan masyarakat Indonesia merupakan salah satu penyebab maraknya ujaran kebencian dan disinformasi di ruang daring. Mereka menunjukkan bahwa revitalisasi nilai-nilai Pancasila terutama musyawarah dan keadilan sosial merupakan langkah strategis untuk memperkuat karakter demokrasi digital yang sehat (Nashoha A.M.M, Dkk, 2025).

Demokrasi Pancasila dalam konteks algoritma berarti menegaskan kembali orientasi moral teknologi. Dalam hal ini, Pancasila dapat menjadi fondasi pembentukan "algoritma berkeadaban", yang berarti sistem digital yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi teknis tetapi juga dampak sosial dan kemanusiaan. Etika demokrasi berdasarkan Pancasila juga akan memotivasi pengguna media sosial untuk mengadopsi prinsip-prinsip tanggung jawab dan empati. Demokrasi Pancasila dalam konteks algoritma berarti menegaskan kembali orientasi moral teknologi (Ashari.F.A, & Najicha.F.U, 2023). Ekspresi gagasan di dunia maya harus dibingkai dengan kesadaran etis agar tidak menjadi kebebasan berekspresi yang merusak. Di sini, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan dapat menjadi pedoman moral dalam menghadapi algoritma manipulatif yang seringkali mengarahkan pengguna pada perilaku ekstrem atau memecah belah.

3. Relevansi Etika Demokrasi Pancasila Bagi Demokrasi Digital

Relevansi Pancasila dan etika demokrasi dalam ranah digital terletak pada kemampuannya untuk menegaskan Kembali peran manusia sebagai komponen moral dalam aktivitas teknologi. Demokrasi digital yang sehat tidak dapat diciptakan hanya melalui regulasi teknis; melainkan, hal ini memerlukan agar pengguna menginternalisasikan prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai seperti kesabaran dalam berdialog, penghargaan terhadap kebenaran, dan keterbukaan terhadap pendapat merupakan contoh hasil konkret dari demokrasi Pancasila di era digital. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Puspitasari dalam jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (2023) menunjukan bahwa Pendidikan digital berbasis Pancasila dapat meningkatkan literasi moral di kalangan antara ekpresi dan penggunaan informasi (Retno Puspitasari, 2023).

Penerapan etika demokrasi Pancasila Bersama dengan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dalam pembentukan kewarganegaraan digital yang berbeda dan bertanggung jawab. Selain itu, demokrasi Pancasila mengerjakan bahwa moralitas, yang timbul dari musyawarah dan kesabaran sosial, merupakan sumber kekuatan politik yang

sejati, bukan hasil dari persaingan politik. Prinsip ini membedakan demokrasi Pancasila dari demokrasi liberal barat dengan mengakui moralitas dan kemajuan sosial sebagai komponen fundamental (Kaelan, 2019). Oleh karena itu, ketika algoritma mulai menggeser kendali ruang publik ke arah yang lebih komersial dan terfragmentasi, penerapan etika demokrasi Pancasila menjadi sarana untuk menegakkan kembali keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, dan kemanusiaan.

C. Relevansi demokrasi Pancasila di era algoritma

Relevansi etika demokrasi Pancasila di ranah digital terlentak pada kemampuannya menegaskan Kembali umat manusia sebagai komponene moral dalam aktivitas teknologi. Demokrasi digital yang sehat tidak dapat diciptakan hanya melalui regulasi teknis: sebaliknya hal ini mengharuskan pengguna untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai seperti kesantunan dalam berdialong, dan keterbukaan terhadap pendapat Adalah contoh hasil nyata demokrasi Pancasila di era digital. Pendekatan ini menuntut transformasi pada tiga domain yang saling bergantung: perancang teknologi, tata kelola platform, dan Pendidikan serta pembudayaan etika digital.

Pertama, pada tataran etika desain, prinsip-prinsip Pancasila mendorong para peneliti algoritma untuk mempertimbangkan tujuan sosial dan implikasi etis di setiap tahap pengembangan. Sejumlah studi dan artikel akademis menyoroti perlunya penerapan prinsip-prinsip Pancasila seperti transparasi dalam rekomendasi, mitigasi bias, dan perlindungan bagi kelompok rentan pada desain algoritma (Firmansyah.R, Hamzah.S,& Hamzah, 2025). Penelitian tentang implementasi rekayasa algoritma pada platfrom local menunjukan bahwa, tanpa parameter etis yang eksplisit optimis untuk keterlibatan secara konsisten memprioritaskan konten sensorik yang meningkatkan kualitas pertimbangan publik (Al Fatih.I.Z, & Putera, R. A.,& Umar.Z.H,, 2024). Oleh karena itu, penilaian dampak algoritmik yang mengurangi implikasi sosial dari sistem rekomendasi begitu relevan sebagai sarana untuk mengevaluasi etika Pancasila pada tahap desain teknologi.

Kedua, pada rana tata kelolah, demokrasi Pancasila mendukung model ko-regulasi yang mencakup negara, platfrom, masyarakat sipil, dan akademisi karena sebuah model yang mencerminkan representasi komunal dan musyawarah. Literatur hukum indonesia merekomendasikan adudit algoritma dan mekanisme pelaporan, persyaratan pengungkapan terkait kriteria rekomendasi, serta Tindakan korektif yang harus diambil jika algoritma menyebabkan kerugian publik (Santoso.W.J, 2023). Pengalaman lokal seperti intervensi kominfo terkait literasi digital dan konten menunjukkan bahwa regulasi teknologi harus diterapkan dengan pendekatan partisipatif agar tanggung jawab sosial dan kebijakan dapat diatasi (Rafif.R, Aulia.S, Iksan, Fatih.J, Antoni.H, 2024).

Ketiga, dari sisi Pendidikan dan budaya digital, penting untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila guna mengngembangkan kewarganegaraan digital yang baik. Penelitian terkini di indonesia menunjukkan adanya kekurangan kemampuan dalam mengindentifikasi disinformasi dan memahami mekanisme personalisasi konten; program literasi digital yang mengintergrasikan prinsip-prinsip Pancasila, seperti gotong royong, pemahaman terhadap perbedaan, dan kepekaan sosial, efektif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat umum dalam mengambil keptusan (Supriyatno.M.J, Supriyatno.R.A.R, Pasha.Z.M, Siregar.S.A, Kembara.M.D, 2024). Inisiatif kurikulum dan modul pembelajaran yang menggabungkan Pendidikan Pancasila dan literasi media telah diujicobakan di sejumlah lembaga Pendidikan sebagai Upaya membangun kebiasaan berpikir kritis dan etis di ruang daring (Furnamasar.Y.F, Dkk, 2024).

Meskipun demikian, penerapan norma-norma Pancasila dalam praktik algoritma menimbulkan tantangan nyata. Pertama, terhadap dilemma regulasi antara menegakkan kebebasan berekspresi dan intervensi terkait merusak ketegangan yang memerlukan keseimbangan etis yang halus agar kebijakan tidak menjadi sensor sepihak (Sanjaya.Y, & Pahlevy.R.R, 2024). Kedua, kemampuan teknis dan sumer daya institusional untuk mendukung dan memantau platform global masih belum memadai; kolaborasi internasional dan Pembangunan kapasitas lokal menjadi strategi implementasi yang efektif (Rafif.R, Aulia.S, Iksan, Fatih.J, Antoni.H, 2024). Ketiga, transformasi masyarakat membutuhkan waktu; menginternalisasi Pancasila dalam bentuk digital mendorong partisipasi aktif dan Pendidikan berkelanjutan bagi semua orang yang membutuhkannya.

Relevansi Pancasila di era algoritma dapat ditunjukkan melalui rekomendasi berikut: pengembangan standar nasional untuk etika algoritma yang sesuai dengan Pancasila, penerapan penilaian dampak algoritma yang wajib dilakukan untuk proyek bersekala besar, mekanisme ko-regulasi yang memfasilitasi pengawasan public dan aksesibilitasi platfrom, dan integrasi Pendidikan digital berbasis Pancasila ke dalam semua bidang studi (Yusuf.N, Wibowo.A.P, Budiono, 2024). Jika dilaksanakan secara konsisten, Langkah-langkah ini tidak hanya mengatasi masalah teknis; mereka juga mengubah ruang digitl public menjadi forum diskusi yang lebih inklusif dan canggih dengan kata lain, mereka membawa prinsip-prinsip demokrasi Pancasila ke dalam praktik teknologi kontemporer.

KESIMPULAN

Era algoritma telah membawa perubahan signifikan dalam demokrasi indonesia. Media sosial, yang dulu dianggap sebagai alat partisipasi public, kini didominasi oleh logika algoritma yang memprioritaskan keterlibatan dan

keuntungan di atas deliberasi dan kebenaran. Akibatnya, ruang digital public sering kali terfragmentasi oleh polarisasi, disinformasi, dan kurangnya kepercayaan publik. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menjadi landasan penting untuk mengkaji standar etika kehidupan digital bangsa.

Kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial adalah contoh-contoh prinsip Pancasila yang dapat berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menangani masalah algoritma. Pancasila tidak hanya digunakan sebagai simbol ideologis; ia juga berfungsi sebagai etika praktis dalam mengatur penggunaan teknologi. Sistem pengelolaan digital dapat dibuat lebih partisipatif dan transparan melalui prinsip musyawarah untuk mufakat. Di sisi lain, semangat etika dan keadilan kemanusiaan dapat digunakan sebagai landasan moral untuk algoritma yang menganalisis perilaku manusia dan mengidentifikasi bias serta diskriminasi terhadap suatu kelompok.

Selain itu, mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam literasi digital dan teknologi dapat memperkuat peran Bangsa etis dalam dominasi global platform-platform. Menurut Yudi Latif, Pancasila adalah sistem nilai yang dinamis dan kokoh, yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Di era digital, hal ini mengarah pada penafsiran ulang Pancasila sebagai etika komunikasi dan sosial dalam dunia Maya. Oleh karena itu, membangun masyarakat digital berdasarkan Pancasila merupakan langkah strategis dalam menciptakan ruang publik yang inklusif dan diterima dengan baik.

Secara ringkas, penerapan Demokrasi Pancasila dalam algoritma media sosial bukan hanya suatu keharusan moral, tetapi juga merupakan tanda kemajuan demokrasi Indonesia di era digital. Penerapan prinsip-prinsip ini harus dilakukan melalui tiga pilar utama: (1) pengembangan teknologi berdasarkan etika Pancasila, (2) kerja sama internasional antara negara-negara, platform, dan masyarakat sipil, serta (3) pendidikan literasi digital yang mengintegrasikan nilai-nilai manusiawi, agama, dan sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya tetap relevan di era algoritma, tetapi juga berfungsi sebagai kompas moral dalam menavigasi revolusi digital yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Al Fatih.I.Z, & Putera, R. A. & Umar.Z.H, (2024). *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Peran Algoritma Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu Peran Algoritma Media Sosial Dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu*. 7(1). https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.

Ashari.F. A, & Najicha.F.U, (2023), Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era Digital, *Research gate*, *4*(1), 2-15.

Dewi Shinta, (2022), Ekonomi Atensi dan Krisis Informasi di Era Digital," *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 9 No. 2

Donny B.U., (2022), *Etika Digital dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Bentang Pustaka,

Firmansyah.R, Hamzah.S, & Hamzah, (2025), Etika Digital dan Pancasila: Sinergi Transformasi Pelajar melalui Proyek Inovasi Teknologi Digital, *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 05, No. 01. https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.673

Furnamasar. Y.F, Dkk, (2024), Pendidikan Pancasila Di Era Digital: Mengatasi Tantangan Moralitas Dan Etika, *IMELJ: Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, Vol. 5, No. 3. https://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1137

Franz Magnis-Suseno, (2018), *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* Yogyakarta: Kanisius

Kaelan, (2013), *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara*,Yogyakarta: Paradigma

Kaelan, (2019), *Demokrasi Pancasila dan Tantangan Globalisasi*, Yogyakarta: Paradigma

Kaelan, (2020), *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma

Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, (2014), *Analisis Data Kualitatif* , Jakarta: UI Press

Nashoha A.M.M, Atqiyah.A.N, Mujahidin.M, Ahnaf.R.A, Jannah.N.Z, (2025), Memahami Pancasila dalam Algoritma Media Sosial: Analisis Wacana Digital Tentang Ideologi Bangsa, *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara,* 2(2), 55-72. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1602

Priwardani, A. N., Monica, A. A. D., & Yaasiin, M. N. F. (2023). *Pancasila sebagai Sistem Etika*. Jurnal Pancasila Sebagai Sistem Etika, 2(3). E-ISSN: 2746-3662.

Puspitasari Retno, (2023), Pendidikan Etika Digital Berbasis Pancasila untuk Generasi Milenial, *jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 9 No. 2

Rafif.R, Aulia.S, Iksan, Fatih.J, Antoni.H, (2024), Peran Pancasila di Era Digital dalam Mewujudkan Penggunaan Teknologi yang Bertanggung

Jawab dan Beretika, *IJEMA: Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, Vol. 2, No. 1. https://doi.org/10.60076/ijema

Rahardjo Budi, (2021), *Algoritma Media Sosial dan Kontrol Informasi Publik*, Jakarta: Gramedia

Santoso.W.J, (2023), Algoritma Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik Politik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi UGM*, Vol. 15 No. 1.

Sanjaya.Y, & Pahlevy.R.R, (2024), Position of Social Media as a Pillar of Democracy in Indonesia: Kedudukan Media Sosial Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia, Doi:10.21070/ups.5783,

Supriyatno. M.J, Supriyatno.R.A.R, Pasha.Z.M, Siregar.S.A, Kembara.M.D, (2024), Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Etika Bersosial Di Era Digital, *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan,* Vol.13 No.1. https://doi.org/10.33061/jgz.v13i1

Wijayanti Tutik, Dkk, (2024), *Demokrasi Era Digital,* Semarang: Cipta Prima Nusantara

Wulandari, V., Rullyana, G., & Ardiansah, A. (2021). Pengaruh algoritma filter bubble dan echo chamber terhadap perilaku penggunaan internet. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 17(1), 98–111. https://doi.org/10.22146/bip.v17i1. 423

Yudi Latif, (2011), *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila,* Jakarta: Gramedia

Yusuf.N, Wibowo.A.P, Budiono, (2024), Digital Citizenship Education: Pancasila As A Source of Digital Ethics in Indonesia, *Journal of Etika Demokrasi,* Vol: 9, No.1. https://doi.org/10.26618/jed.v9i1.1172